

**EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DIMASA PANDEMI  
COVID 19 (STUDI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA)**

**ANDINI PRASISIA RIWAYAT**

**JOHNNY POSUMAH**

**NOVVA PLANGITEN**

*Abstract*

*The National Unity and Politics Agency is one of the Regional Apparatuses established based on the Regional Regulation of North Sulawesi Province Number 6 of 2011 concerning the Organization and Work Procedures of the Inspectorate, Regional Development Planning Agency, Regional Technical Institutions and Other Institutions, including the Establishment of the National Unity and Regional Political Agency North Sulawesi Province. Efforts to increase the effectiveness of employees at the Regional Political and National Unity Agency of North Sulawesi Province have been carried out by utilizing existing human resources. The aim is to improve the effective and efficient governance of the National Unity and Political Agency in order to improve public services and also improve aspects of civil liberties and aspects of political rights. This study was conducted to explain the effectiveness of the work of the State Civil Apparatus during the Covid-19 Pandemic at the Regional Political and National Unity Agency of North Sulawesi Province.*

*Keywords : Work Effectiveness, State Civil Apparatus, Covid-19 Pandemic.*

**Abstrak**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, termasuk didalamnya Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Upaya untuk meningkatkan keefektivan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan juga meningkatkan aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara di masa Pandemi Covid-19 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.**

**Kata Kunci : Efektivitas Kerja, Aparatur Sipil Negara, Pandemi Covid-19.**

## **PENDAHULUAN**

Sejak merebaknya Covid-19 di awal tahun 2020 yang mengemparkan seluruh dunia, telah terkonfirmasi ada sekitar 27 negara yang terpapar virus ini sampai 15 februari 2020. Wabah ini berawal dari salah satu kota yang berada di negara Cina yaitu kota Wuhan. Salah satu peneliti dari Cina menemukan bahwa virus ini berasal dari hewan yaitu kelelawar. Indonesia mengkonfirmasi kasus Covid-19 pertama kali terdeteksi di kota Depok, Jawa Barat yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Karena semakin meningkat kasus Covid-19 di Indonesia, maka salah satu strategi pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diberlakukan di berbagai daerah pada awal April 2020 ketika kasus Covid-19 di Indonesia meningkat dengan pesat. Dengan adanya kebijakan ini, pegawai dituntut untuk bekerja dari rumah dan membatasi segala aktifitas yang mengharuskan untuk keluar rumah. Salah satu kebijakan yang mendapatkan banyak perhatian adalah *Work From Home* (WHO) atau bekerja dari rumah. Teknologi yang semakin maju membuat banyak instansi berlomba-lomba untuk meningkatkan sistem kerja guna menerapkan kebijakan fleksibilitas bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH).

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat keberhasilan atau kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini

berarti organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya pegawai untuk pencapaian tujuan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Terciptanya kelancaran pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas dan fungsi dari pemerintah dalam meningkatkan profesionalitas kerja dalam organisasi.

Dalam era modernisasi, Teknologi yang semakin maju sangat memudahkan seorang karyawan untuk bekerja kapan saja dan dimana saja. Hal ini tentu sangat memudahkan sebagian pihak karena tidak perlu menghabiskan waktu untuk ke kantor. *Work From Home* (WHO) itu sendiri merupakan konsep kerja dimana pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya dari rumah. Ditengah pandemi seperti ini, *Work From Home* (WFH) menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Presiden Joko Widodo juga menghimbau agar sebagian ASN bisa bekerja dari rumah dengan online dan mengutamakan pelayanan prima bagi masyarakat dalam konferensi pers di Istana Bogor, pada 15 Maret 2020. Imbauan ini, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) melalui Surat Edaran nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah menghimbau agar ASN dapat bekerja dari rumah atau tempat tinggal tetapi ada tiga level pejabat tertinggi yang bekerja di kantor.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

merupakan pusat pelayanan masyarakat yang bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam pelaksanaan tugasnya selalu mengutamakan kualitas kerja untuk meningkatkan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Namun ketika menyebarnya Covid-19 di Indonesia diawal tahun 2020, sangat berpengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan terlebih khususnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mengharuskan para pegawai dan ASN bekerja dari rumah. *Work From Home* (WFH) yang diterapkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ini mempunyai banyak kendala salah satunya tidak efektifnya pelayanan yang diberikan pegawai karena keterbatasan sarana dan prasarana karena pekerjaan yang dilakukan hanya menggunakan Internet atau Jaringan dan tidak menutup

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu yang digunakan yaitu:

Penelitian terdahulu ini disusun oleh Muslih Mokoagow yang dibimbing oleh Florence Lengkong dan Very Y. Londa (2020) dengan judul Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik Di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa: Secara umum kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan non fisik atau merujuk

kemungkinan untuk terjadinya miskomunikasi. Profesionalisme pelayanan juga terhambat karena keterbatasan bekerja di kantor (WFO) seperti misalnya ada orang yang ingin bertemu dengan kabid/kasubbid di kantor dan ternyata beliau sedang menjalankan *Work From Home* (WFH) dan harus bolak-balik ke kantor agar bisa bertemu dengan kabid/kasubbid. Banyak juga pegawai/ASN yang memanfaatkan WFH ini dengan bermalas-malasan dan menunda pekerjaan demi kepentingan pribadi masing-masing. Masih banyak lagi masalah yang terjadi ketika pemberlakuan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah. Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dimasa Pandemi Covid-19 (studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara).

pada hasil kerja organisasi publik sudah baik.

Penelitian terdahulu selanjutnya disusun Jufandi Wuri yang dibimbing oleh Burhanuddin Kiayi (2021) dengan judul Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Era COVID-19 (Studi Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa). Penelitian ini bersumber dari permasalahan yang menyangkut kebijakan pelayanan publik. Pada aspek pelayanan publik saat pandemi Covid-19, pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai di kantor Kecamatan Langowan Barat kurang maksimal karena terkendala oleh protokol kesehatan.

Penelitian terdahulu selanjutnya disusun oleh Sendy Tambajong yang

dibimbing oleh Florence D. J. Lengkong dan Gustaaf B. I. Tampi (2017) dengan judul Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan Umum dari aparat pemerintah terhadap warga masyarakat pengguna jasa pelayanan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari hasil wawancara yang rata-rata memberikan masukan agar proses pelayanan lebih mengutamakan kualitas dan kuantitas bagi kepuasan masyarakat.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Putri, A. Lengkong, F. D. J. Londa, V. (2018) dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Ayo Nabung Sampah Dalam Menjaga dan Memelihara Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Maesa Kota Bitung. Dalam melaksanakan pengukuran efektivitas pelaksanaan suatu program tidaklah

## **EFEKTIVITAS KERJA**

### **Pengertian Efektivitas Kerja**

Menurut Mardiasmo (2016:134) “Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.” Sedangkan efektivitas kerja adalah tingkatan sejauh mana seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. “Kata efektif mempunyai arti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan” (Adisasmita, 2011). Sedangkan Ravianto (2014:11) “Pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan

mudah dan sederhana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Maesa, menunjukkan bahwa pelaksanaan program Ayo Nabung Sampah sudah berjalan dengan cukup efektif dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.

Penelitian terdahulu yang terakhir oleh Mufara Y. Tulusan F. Londa V. (2016) dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pegawai di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Jurnal Administrasi Publik (JAP). 3. (38). Penelitian ini menekankan kepada kelompok efektivitas individu pegawai yang ada di Distrik Kaimana. Dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap efektivitas kerja pegawai yang ada di Distrik Kaimana sudah menunjukkan efektivitas kerja yang cukup baik. Sekalipun memang harus diakui masih ada berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan efektivitas kerja yang lebih baik lagi.

keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan”.

Pengertian tentang efektivitas kerja juga dikemukakan oleh beberapa ahli lainnya, menurut Siagian (2012:22) “Efektivitas kerja artinya penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.” Pendapat yang dikemukakan oleh Gibson (2010), “efektivitas merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk rnencapai tujuan usaha bersama.” Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Sedangkan menurut Denison yang diterjemahkan oleh Khairul Saleh (2010:15) “Efektivitas kerja adalah suatu

ukuran dalam mengukur keefektivan perusahaan melalui beberapa pendekatan yang hasilnya bisa dilihat dari tingkat pencapaian tujuan perusahaan.” Berdasarkan pada pernyataan tersebut bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian sasaran atau tujuan.

Berdasarkan teori diatas, efektivitas kerja sangat penting perannya sebagai salah satu cara dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab dalam bekerja. Dengan efektivitas kerja, pegawai dapat memastikan pemahaman para pelaksana kerja dengan menyesuaikan tugasnya untuk pencapaian kerja yang efektif dan efisien.

### **Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja**

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja menurut Denison yang diterjemahkan oleh Khairul Saleh (2010:18), yaitu:

- 1) Karakteristik Organisasi  
Karakteristik Organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi.
- 2) Karakteristik Lingkungan  
Lingkungan luar dan lingkungan dalam juga sangat berpengaruh atas efektivitas
- 3) Karakteristik Pekerja  
Pada kenyataannya para anggota organisasi adalah faktor pengaruh yang paling penting
- 4) Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen  
Peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit.

### **Indikator Efektivitas Kerja**

Adapun beberapa indikator untuk mengukur efektivitas kerja menurut Hasibuan (2003) yaitu:

- 1) Kualitas Kerja
- 2) Kuantitas Kerja
- 3) Pemanfaatan Waktu

Makmur (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berfikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan sasaran.

### **APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

#### **Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Pengertian Aparatur adalah segala aspek administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. “Adapun beberapa aspek administrasi yang cukup penting adalah administrasi organisasi dan administrasi kepegawaian.” (Handyaningrat : 1982). Adapun pengertian aparatur sipil negara (ASN) adalah profesi bagi orang yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam suatu instansi pemerintah.

Musanef (2011:5), berpendapat juga bahwa “pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.” Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

aparatur sipil negara adalah “seseorang yang bekerja pada suatu kesatuan organisasi, baik aparatur sipil negara tetap maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”.

### **Fungsi, Tugas dan Peran Aparatur Sipil Negara**

Pegawai ASN berfungsi sebagai:

- 1) Pelaksanaan kebijakan publik
- 2) Pelayanan publik
- 3) Perikat dan pemersatu bangsa

Pegawai ASN bertugas:

- 1) Melaksanakan kebijakan publik
- 2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
- 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia
- 4) Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

### **CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

#### **Pengertian Coronavirus Disease (COVID-19)**

Menurut WHO (2020), penyakit coronavirus disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti, pneumonia. Virus corona (Covid-19) pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada awal kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan pada akhir Desember 2019 di Wuhan yang berada di provinsi Hubei, Cina Tengah, virus pun menyebar dengan cepat ke luar Hubei.

### **Asal Mula Penyebaran Coronavirus Disease 2019 di Indonesia**

Penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia terdeteksi pada tanggal 14 Februari 2020 di kota Depok, Jawa Barat. Pasien terinfeksi virus corona karena berdansa dengan WNA Jepang yang terkonfirmasi covid 19 pada saat kembali ke Jepang. Selang dua hari, yakni 16 Februari 2020 pasien terkena sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena hal-hal yang diteliti menggambarkan atau mendeskripsikan tentang fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan cara melakukan pengamatan langsung dan wawancara.

Penelitian ini difokuskan untuk mengukur Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dimasa Pandemi Covid-19 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan pengukuran dari Makmur untuk mengetahui ketepatan waktu, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan sasaran.

Informan pada penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian yaitu:

1. Sekertaris Badan (1 orang)
2. Kepala Sub Bagian Umum (1 orang)

3. Kepala Sub Bidang Hukum dan Kepegawaian (1 orang)
4. ASN lainnya (4 orang)

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah “*Analysis Interactive*” Model dari Miles dan Huberman yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dirangkum dan dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengukur efektivitas kerja ASN di masa Pandemi Covid-19 sama dengan sebelum adanya pandemi yaitu sesuai SOP yang berlaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh ketika adanya pandemi Covid-19 tidak ada perubahan waktu kerja tetapi pegawai dibagi menjadi 50% WFH dan 50% WFO sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pukul 08.00 wita sampai 16.00 wita. Untuk pelayanan publik tetap dilayani sesuai rekomendasi 2-3 hari kerja.

2. Ketepatan dalam Pengukuran

Indikator ketepatan dalam pengukuran yang ada di Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diukur dari segi berjalan atau tidaknya program atau kegiatan yang telah disusun. Ketepatan standar pengukuran yang digunakan sangat berpengaruh terhadap keefektivan pegawai. Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, program yang dijalankan sudah sesuai standarisasi dan berjalan dengan lancar. Tetapi dimasa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, banyak program atau kegiatan-kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.

3. Ketepatan dalam menentukan Tujuan

Indikator Ketepatan dalam menentukan Tujuan, pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus mempunyai tujuan kerja yang pasti. Ketepatan waktu bekerja sudah sesuai SOP yang berlaku sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi Covid-19 tidak ada yang berubah.

4. Ketepatan Sasaran

Indikator yang terakhir adalah Ketepatan Sasaran. Tepat sasaran merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tercapainya tujuan atau tidak. Untuk bisa tepat sasaran, pegawai harus bisa beradaptasi dengan dengan lingkungan tepat dia bekerja. Dengan adanya pemberlakuan *work from home* diharapkan pegawai bisa beradaptasi dengan lingkungan

dirumah dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan maksimal.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, ada beberapa informan yang setuju dengan adanya kebijakan *work from home* ini tetapi tidak sedikit juga yang tidak setuju dan berharap supaya bisa bekerja secara langsung di kantor.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mencapai efektivitas kerja menggunakan teori Makmur, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ketepatan waktu yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum maksimal dimasa pandemi Covid-19.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Pencapaian tujuan kerja yang dilakukan selama pandemi berlangsung adalah dengan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh pegawai dan kerja sama tim yang baik.
4. Untuk mencapai sasaran yang tepat proses adaptasi yang dilakukan pegawai dalam menghadapi pandemi Covid-19 yaitu dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di rumah maupun di kantor.

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan bisa memaksimalkan waktu pengerjaan tugas dengan mengatur sebaik mungkin tugas rumah dan tugas kantor.
2. Ketepatan pengukuran dalam menjalankan program bisa di maksimalkan lagi meskipun dengan keterbatasan bersosialisasi dan bisa diganti dengan pertemuan secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*.
3. Menjalin komunikasi yang baik antara sesama pegawai dan juga pimpinan masing-masing bidang sangat penting ketika diberlakukannya *work from home*.
4. Meskipun bekerja dari rumah diharapkan pegawai dapat menyadari tugas kerja dan tanggungjawabnya untuk menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gibson, L. J. 2010. *Organization, Terjemahan*. Jakarta Airlangga.
- Handyaningrat. 1982. *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung Jakarta.
- Putri, A. Lengkong, F.D.J. Londa, V.Y. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Ayo Nabung Sampah Dalam Menjaga dan Memelihara

- Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Maesa Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 4 (64).
- Makmur. 2010. *Efektivitas kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Rafika Aditama Bandung.
- Mardiasmo 2016 . *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: *Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mokoagow, M. Lengkong, F.D.J. Londa, V.Y. 2020. Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik Di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Mufara, Y. Tulusan, F. Londa, V. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pegawai di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 3 (38).
- Musanef. 2011. *Manajemen Kepegawaian di Judo Mesia*. Gunung Agung Jakarta.
- Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Tambajong, S. Lengkong, F.D.J. dan Tampi, G.B. 2017. Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Wuri, J. Kiayi, B. 2021. Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Era COVID-19 (Studi Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Negara (JAP)*.